





TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jl. Amil No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Ph. : (62-21) 021-2279 2806/07 Fax: 021-2279 2806/07
Email : Info@ti.or.id Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :
Leo Simanjuntak, Chair
Ismid Hadad,
Utama Kajo,
Metta Dharmasaputra,
Anung Karyadi

Executive Board :
Felia Salim, Chair
Rezki Sri Wibowo,
Wandy Nicodemus Tuturoong,
Usman Hamid,
Bivitri Susanti,
Meuthia Ganie Rochman,
Hariadi Kartodihardjo

Secretary General :
Danang Widoyoko

No : 235/TII-DPG/FGD/V/2023 Jakarta, 4 Mei 2023
Perihal : Undangan Narasumber
Lampiran : Kerangka Acuan Kerja

Kepada Yth.
Sarah Sadiqa, SH., M.Sc.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Di Tempat

Dengan hormat,

Sejak akhir tahun lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapat penugasan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa segera disusun dan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Melihat pentingnya situasi diatas, TI Indonesia memandang penting bagi masyarakat sipil untuk mengawal proses penyusunan Rancangan undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Oleh karenanya, kami bermaksud untuk mengundang Ibu Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sebagai narasumber yang akan dilaksanakan pada;

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Mei 2023
Waktu : 10.00 - 16.00
Tempat : Aloft Hotel Wahid Hayim
Jl. K.H. Wahid Hasyim No.92, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Demikian surat permohonan narasumber ini kami sampaikan, dengan harapan ibu bisa menghadiri undangan kami. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agus Sarwono, peneliti TII melalui alamat surel: asarwono@ti.or.id atau nomor 08126992667. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 

Danang Widoyoko
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Forum Diskusi Terfokus
Respon Masyarakat Sipil dalam Rencana Penyusunan
RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Selasa, 9 Mei 2023

Latar Belakang

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021. Penurunan sebesar empat poin ini menjadi penurunan paling tajam dan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah tidak tepat, lambat, dan minim dampak.

Tentu kita semua sepakat bahwa, korupsi merupakan persoalan yang paling menghambat pembangunan di Indonesia termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Meskipun kita semua tahu bahwa, sistem pengadaan barang dan jasa publik telah banyak mengalami perubahan. Namun faktanya, korupsi pengadaan barang dan jasa masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia

Bahkan, KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan.

Sejak akhir tahun lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapat penugasan untuk menyusun Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. RUU pengadaan barang/jasa publik diharapkan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (transformasi digital), menciptakan satu pasar nasional (K/L/PD, BUMN/BUMD, dan Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif. Dengan adanya RUU PBJ tentu diharapkan, proses pengadaan akan lebih transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan situasi diatas, Transparency International Indonesia menilai penting bagi masyarakat sipil untuk mengawal proses penyusunan Rancangan undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Oleh karenanya, kami bermaksud untuk melaksanakan diskusi terfokus guna merespon rencana penyusunan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik.

Tujuan

1. Memetakan risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik melalui sistem e-procurement
2. Adanya daftar inventaris masalah pengadaan barang dan jasa versi masyarakat sipil.
3. Adanya strategi advokasi dalam mengawal rancangan pengadaan barang dan jasa publik

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Mei 2023

Waktu : 10.00 - 16.00

Tempat : Aloft Hotel Wahid Hayim

Jl. K.H. Wahid Hasyim No.92, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Alur Kegiatan

09.30 – 10.00	Registrasi	
10.00 – 10.10	Pembukaan	
10.10 – 10.50	Pemantik 1: Urgensi Penyusunan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Ibu Sarah Sadiqa, SH., M.Sc. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
10.50 – 12.00	Sesi Diskusi	Fasilitator
12.00 – 13.30	ISHOMA	Panitia
13.30 – 14.10	Pemantik 2: Bagaimana Menutup celah praktik korupsi dalam Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Bapak Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. Akademisi Universitas Gadjah Mada
14.10 – 15.00	Sesi Diskusi	Fasilitator
15.00 – 16.00	Penyusunan Rencana Advokasi RUU PBJ	Fasilitator
16.00	Penutup	Panitia

Daftar Pertanyaan

1. Risiko korupsi pengadaan barang dan jasa publik pada sistem digitalisasi pengadaan dan barang dan jasa publik?
2. Bagaimana kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa? Bagaimana integritas UKPBJ?
3. Bagaimana konsolidasi pengadaan barang dan jasa, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah? BUMN dan BUMD?
4. Proyeksi upaya pencegahan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa publik?

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi narahubung kegiatan ini melalui Agus Sarwono, 08126992667 atau asarwono@ti.or.id

Daftar Peserta

1. Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan (LKPP)
2. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (LKPP)
3. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
4. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
5. Transparency International Indonesia
6. Indonesia Corruption Watch (ICW)
7. Seknas Fitra
8. PATTIRO
9. MediaLINK
10. Indonesia Budget Center (IBC)
11. Open Contracting Partnership (OCP)
12. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
13. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
14. Gerak ACEH
15. SD-Inpers Jember
16. Bengkel APPEK - Kupang
17. Kopel Jabodetabek
18. ACC Sulawesi
19. Perkumpulan Hapsari
20. Perkumpulan Pikul
21. LBH Surabaya

Diskusi RUU PBJ
7 Februari 2023

No.	Aspek	Keterangan	Dorongan Advokasi
1.	Kelembagaan UKPBJ	a. Kewenangan	
		b. Sumber Daya Manusia	
		c. Mekanisme evaluasi	
		d.	
2.	Pengawasan	a. Kelembagaan / External	Lembaga Pemantau Independen dalam PBJ; <ul style="list-style-type: none"> - Ikatan Ahli Pengadaan - Perwakilan Masyarakat Sipil - Akademisi
		b. Kewenangan / Internal	Bersama Inspektorat melakukan pemantauan proses PBJ
3.	Keterbukaan Informasi	a. Dokumen	Publikasi dokumen kontrak secara digital
		b. LPSE dan e-Katalog	
		c. Pengadaan yang bersumber dari DAU dan DAK	
4.	Pengadaan Darurat	a. Publikasi Daftar Pengadaan darurat	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan aturan dan regulasi dalam pelaksanaan pengadaan darurat -
		b. Mekanisme	
5.	Pencegahan Benturan Kepentingan	a. Penguatan SIKAP untuk membuka informasi BO	
		b. Daftar Hitam (Perusahaan dan Individu)	Efek jera bagi penyedia
6.	Mekanisme Pengaduan	a. Informasi dan Notifikasi Proses	
		b. KPPU – Bahas tentang indikasi persekongkolan - (Dasarnya peraturan LKPP)	
		c. Inspektorat	
7	Aktor	UKPBJ	

		UMKM	
		BUMN, BUMD, BUMDesa, BLU, BLUD, PTNBH, Badan Publik yang berkaitan dengan keuangan negara (OJK, BI)	
8	Pengadaan Khusus (Studi kasus Perpres 17/2019 Pengadaan di Papua dan Papua Barat		
9	Pengadaan Internasional		
10	Sanksi		
11	Sustainable / green investment		
12	Sengketa Pengadaan		
13	PDN yang seperti apa?		Efektivitas dan efisiensi

Audiensi dengan LKPP

